

berkomitmen untuk mendukung keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD ART PPP yang ditetapkan dalam Mukhtamar VII Bandung 2011 bahwa: “Tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah *Subhanahu Wata’ala*.

PPP merupakan partai politik penerus estafeta empat partai Islam dan wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggungjawab tokoh-tokoh umat Islam dan Pimpinan Partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa T’ala melalui perjuangan politik. PPP yang berasaskan Islam berketetapan hati dan bertekad dengan segenap kemampuannya untuk berusaha mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur, rohaniah dan jasmaniah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Platform Partai

PPP berpendapat bahwa Islam sebagai syari’at terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa T’ala kepada umat manusia di muka bumi adalah suatu kebenaran mutlak yang mengandung tuntunan kebajikan yang bersifat universal serta meliputi seluruh aspek kehidupan dan berlaku sepanjang masa. Islam sebagai agama (ad-dien) mengandung nilai kebenaran absolut karena ajarannya

merupakan aparat ideologi partai (ideological party apparatus) untuk mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan visi dan misi PPP.

Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa internalisasi nilai-nilai ideologi harus menjadi warna, corak, dan shibghah (identitas) Partai, yang melambangkan keluhuran dari ajaran Islam. PPP harus menyadari bahwa sebagai Partai yang membawa ideologi Islam memiliki beban dan tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kehormatan dan marwah agama Islam.

a. Program Kerja Partai PPP

Berdasarkan sejarah perjuangan dan jati diri di atas, maka visi PPP adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

Di bidang agama, platform PPP menegaskan tentang; Perlunya penataan kehidupan masyarakat yang Islami dan berakhlaqul karimah dengan prinsip amar makruf nahi munkar; Pentingnya peran agama (Islam) sebagai panduan moral dan sumber inspirasi dalam kehidupan kenegaraan; Paradigma hubungan antara Islam dan negara yang bersifat simbiotik, sinergis serta saling membutuhkan dan memelihara, yang berpegang pada prinsip harmoni antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan, dan komitmen pada prinsip dan sikap toleransi antar umat

beragama. Sementara itu di bidang politik, PPP berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah. PPP menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), menghargai kebebasan berekspresi, berpendapat dan berorganisasi, terwujudnya good and clean government, dan upaya mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Platform ekonomi PPP mempertegas keberpihakannya pada konsep dan sistem ekonomi kerakyatan, terwujudnya keadilan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, penguasaan negara terhadap cabang-cabang ekonomi yang menguasai hidup orang banyak, maksimalisasi peran BUMN dan BUMD, dan mendorong peningkatan keswadayaan nasional (unit usaha keluarga/individual, usaha swasta, badan usaha negara dan koperasi) demi terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat dan bangsa Indonesia.

PPP berkomitmen pada upaya tegaknya supremasi hukum, penegakan HAM, terwujudnya tradisi kepatuhan hukum dan tradisi berkonstitusi, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, pembaruan hukum nasional, terciptanya tertib sipil dan rasa aman masyarakat, penguatan institusi dan instrumen penegak hukum, serta penguatan moralitas penegak hukum.

PPP berjuang demi terwujudnya kehidupan sosial yang religius dan bermoral, toleran dan menjunjung tinggi persatuan, taat hukum dan tertib sipil, kritis dan kreatif, mandiri, menghilangkan budaya kekerasan, terpenuhinya rasa

aman masyarakat, mencegah segala upaya marjinalisasi dan kolonisasi budaya lokal baik atas nama agama maupun modernitas dan pembangunan, mengembangkan nilai-nilai sosial budaya yang bersumber pada ajaran etik, moral dan spiritual agama, serta mengembangkan seni budaya tradisional dan daerah yang memperkaya seni budaya nasional yang didalamnya dijiwai oleh nilai-nilai keagamaan.

PPP berkomitmen pada terwujudnya manusia Indonesia yang berkualitas yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai serta kualitas kesehatan yang baik. Program pembangunan kesejahteraan hendaknya diarahkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan merata serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PPP bertekad menjadikan bidang pendidikan sebagai prioritas dan titik tolak pembangunan kesejahteraan, yang darinya diharapkan lahir manusia Indonesia yang cerdas, trampil, mandiri dan berdaya saing tinggi.

Visi politik luar negeri PPP diorientasikan pada upaya mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, dalam arti bahwa Indonesia ikut aktif memajukan perdamaian dunia dan menentang segala bentuk penjajahan, menolak ketergantungan terhadap pihak luar manapun yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia, memelihara persahabatan antara negara Republik Indonesia dengan negara-negara lain atas dasar saling menghormati dan kerjasama menuju

terwujudnya perdamaian dunia yang adil, beradab dan dengan prinsip keseimbangan.

Misi PPP (Khidmat Perjuangan) PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah (persaudaraan sesama muslim).

Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan.

PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika.

PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat.

PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.

3. Sejarah di tubuh PPP

PPP menegaskan dirinya sebagai partai Islam yang berorientasi keindonesiaan dan keumatan. Artinya, PPP berbeda dengan partai-partai sekuler yang tidak berasas Islam dan cenderung memisahkan secara diametral antara Islam dan negara, serta menjauhkan peran-peran Islam dalam kehidupan kenegaraan. Sebagai partai Islam, PPP juga menegaskan perbedaan dirinya dengan partai-partai Islam lain yang berpaham fundamentalis-radikal, yang lebih menonjolkan simbol dan agenda universal Islam di atas kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Identitas Islam PPP mencerminkan corak “Islamnya orang Indonesia” atau “Islam keindonesiaan”, yang berpegang pada prinsip harmoni

antara universalitas Islam dan lokalitas keindonesiaan. Dalam hal ini, hubungan Islam dan negara bersifat simbiotik, sinergis, serta saling membutuhkan dan memelihara. Ini sesuai dengan tujuan politik PPP yang diorientasikan bagi terwujudnya negara Indonesia yang damai, makmur, sejahtera serta religius dan bermoral. Dalam perjuangannya, PPP berpegang pada pemahaman Islam yang inklusif, moderat, santun, serta anti kekerasan dan anti radikalisme, sebagai penjabaran dari Islam yang *Rahmatan Lil Alamin*.

PPP yang dideklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 merupakan hasil fusi politik partai-partai Islam yang ada saat itu, sekaligus sebagai kelanjutan dari perjuangan politik Islam sejak masa kemerdekaan, yakni sejak lahirnya organisasi pergerakan Islam modern seperti Syarikat Dagang Islam (1905) yang kemudian menjadi Partai Syarikat Islam, Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), Masyumi dan lain-lain. Meskipun memiliki 4 (empat) aliran sekaligus di dalamnya dan akhirnya disatukan dalam PPP maka menjadi sebagai wadah perjuangan aspirasi politik umat Islam yang terus berjuang untuk membawakan aspirasi dan kepentingan umat dan bangsa, terutama dalam menjaga agar produk-produk peraturan perundang-undangan tetap berada dalam nafas dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

B. Perbandingan Perolehan Suara PPP dalam Pemilu

PPP sudah mengikuti sebanyak enam kali sejak tahun 1977 sampai pemilu dipercepat tahun 1999 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik.

yang ditembak, dipukul, dan malah ada yang dibunuh. Saksi-saksi PPP diancam, suara yang diberikan rakyat ke PPP dimanipulasi untuk kemenangan Golkar, mesin politik Orde Baru. Jadi kalau ada yang menyatakan PPP adalah bagian dari Orde Baru sangat tidak beralasan. Karena faktanya bahwa dalam Pemilu 1999, 2004, dan 2009 suara PPP selalu turun. Dan ini merupakan tantangan bagi kepengurusan PPP.

C. Sejarah Konflik PPP

Kedekatan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali dengan Partai Gerindra memicu perpecahan dalam pengurus PPP. Konflik PPP memang sudah ada sejak awal berdirinya partai tersebut mengingat corak keberagamannya. Hanya saja jika direlevansikan dengan konflik PPP yang terjadi setahun belakangan ini maka jelas berbeda. Konflik PPP masa Orde Baru hanya seputar ideologi di kalangan internal saja dan menyebabkan persoalan pembagian jatah kursi. Namun konflik PPP sekarang bukan tentang ideologi lagi melainkan juga disebabkan oleh intervensi dari pihak luar, terlebih menjelang Pemilihan Presiden tahun 2014 lalu. Hal ini dapat dilihat dari adanya perbedaan pandangan dari kepengurusan dalam hal keputusan untuk berkoalisi. Ini membuktikan bahwasanya konflik PPP sekarang bukan hanya melibatkan internal partai saja melainkan juga sedikit banyak sudah melibatkan pihak luar. Logikanya tidak akan ada perbedaan pandangan dalam hal berkoalisi jika tidak ada pula intervensi dari pihak luar.

Keluarnya NU itu memberi pengaruh buruk bagi PPP pada pemilu 1987. Waktu itu perolehan suara nasional partai Kabah jeblok menjadi 15,6 persen. Padahal pada pemilu sebelumnya (1982), PPP memperoleh suara nasional 27,78 persen.

3. Suara PPP pada Pemilu 1987 merosot, John Naro dicopot

Merosotnya suara PPP pada Pemilu 1987 ini kemudian berakibat dicopotnya Naro dari posisi ketua umum pada muktamar PPP 1989. Kendati penggantinya bukan dari unsur NU (yakni Buya Ismail Hasan Metareum), tapi kejatuhan Naro ini mendapat sambutan positif dari banyak kubu, terutama tokoh-tokoh NU.

4. PPP terbelah saat pemilu 1999

Gelombang reformasi 1998 berpengaruh terhadap PPP. Partai ini mengalami masalah-masalah serius yang berpengaruh pada perolehan suara nasional pada Pemilu 1999. Konflik internal yang menjadi ciri khas partai ini masih seputar masalah sektarian, yang kemudian membelah-belah basis massa partai. Misalnya, ketika Gus Dur membentuk PKB. Meski PKB bukan sempalan PPP, tapi terbentuknya PKB otomatis menggerogoti suara PPP dari basis massa NU. Begitu juga dengan pembentukan PAN oleh Amien Rais. Meski PAN juga bukan sempalan PPP, tapi basis massa PPP dari Muhammadiyah pun habis. Paling mencolok adalah pembentukan PBR oleh Zaenuddin MZ. PBR ini dikenal sebagai sempalan dari PPP. Akibat dari terbelah-belahnya basis massa PPP itu, pada Pemilu 1999 suara mereka jeblok hanya sebesar 10 persen.

5. Konflik usai Pemilu 2014, kubu SDA dan Romahurmuzzy

Pada Pemilu 2004 dan 2009, PPP nampak tenang. Tidak ada konflik mencolok di internal partai Kabah itu. Namun suasana berubah drastis usai Pemilu 2014. Prahara kembali melanda partai ini. Dipicu sikap SDA menghadiri kampanye Partai Gerindra yang dinilai oleh 26 pengurus DPW PPP di daerah sebagai "perselingkuhan politik", lalu konflik menukik tajam hingga sampai ancaman pemecatan terhadap pengurus DPW bersama Sekjend oleh SDA. Namun ancaman itu dilawan oleh kubu wakil ketua dan Sekjend PPP dan pengurus DPW. Mereka malah menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) membahas Mukernas III. Rapat itu tidak dihadiri SDA. Alih-alih datang, dia malah hendak menggelar rapat pleno menyelesaikan masalah tersebut.

D. Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur

PPP di Jawa Timur layaknya PPP di daerah lain juga memiliki kantor DPW, DPC, dan juga Ranting. Adapun untuk kantor DPW nya terletak di Jalan Kendangsari nomor 36 Surabaya, sedangkan untuk DPC bertempat di Jalan Adityawarman Surabaya.

Seperti yang telah dibahas sekilas diatas bahwasanya Jawa Timur secara tidak langsung merupakan lumbung suara bagi PPP, sebab memang PPP adalah partai yang berazaskan Islam dengan mayoritas NU. Hal ini sesuai dengan Jawa Timut yang juga merupakan basis dari NU. Dalam PPP Jawa Timur khususnya di DPW, struktur kepengurusannya terbagi menjadi 2 kubu, yakni Kubu Romahurmuziy dan Kubu Djan Faridz. Meskipun begitu, nyatanya memang DPW

